



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 513 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, perlu dikembangkan budaya sadar hukum yang salah satunya melalui penetapan desa/kelurahan sadar hukum;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, Bupati sebelum mengusulkan desa/kelurahan binaan sadar hukum kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi desa/kelurahan sadar hukum terlebih dahulu melakukan penetapan desa/kelurahan binaan sadar hukum dan melakukan pembinaan terhadap desa/kelurahan binaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-Pr.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
5. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 157);

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum Tahun 2022, dengan daftar Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Desa/Kelurahan Binaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan pembinaan secara terus menerus untuk menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

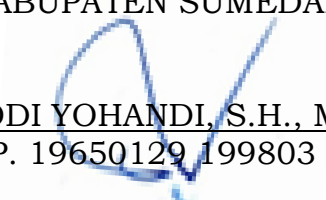
Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUMEDANG
NOMOR 513 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DESA/KELURAHAN BINAAN
SADAR HUKUM TAHUN 2022.

DAFTAR DESA/KELURAHAN BINAAN SADAR HUKUM TAHUN 2022

NO	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
1	Wado	1.	Desa Cimungkal
		2.	Desa Cilengkrang
		3.	Desa Cikareo Selatan
		4.	Desa Cikareo Utara
		5.	Desa Wado
		6.	Desa Sukajadi
		7.	Desa Cisurat
2.	Darmaraja	8.	Desa Darmaraja
		9.	Desa Darmajaya
		10.	Desa Sukaratu
		11.	Desa Cikeusi
		12.	Desa Cipeuteuy
		13.	Desa Cieunteung
		14.	Desa Karangpakuan
		15.	Desa Neglasari
		16.	Desa Tarunajaya
		17.	Desa Ronggon
3.	Cibugel	18.	Desa Jayamekar
		19.	Desa Cibugel
		20.	Desa Sukaraja
		21.	Desa Tamansari
4.	Conggeang	22.	Desa Cibeureuyeuh
5	Buahdua	23.	Desa Hariang
6	Tanjungsari	24.	Desa Jatisari
		25.	Desa Kadakajaya
7.	Sukasari	26.	Desa Sukasari
		27.	Desa Genteng
		28.	Desa Banyuresmi
		29.	Desa Nanggerang

NO	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		30.	Desa Mekarsari
		31.	Desa Sindangsari
		32.	Desa Sukarapih
8.	Pamulihan	33.	Desa Cigendel
		34.	Desa Cijeruk
		35.	Desa Pamulihan
		36.	Desa Haurngombong
9.	Cimanggung	37.	Desa Cimanggung
		38.	Desa Sindangpakuon
		39.	Desa Sindanggalih
		40.	Desa Cikahuripan
		41.	Desa Sukadana
		42.	Desa Pasirnanjung
11.	Jatinangor	43.	Desa Hegarmanah
		44.	Desa Cibeusi
		45.	Desa Cipacing
		46.	Desa Mekargalih
		47.	Desa Cintamulya
		48.	Desa Jatimukti
		49.	Desa Cisempur
		50.	Desa Jatiroke
		51.	Desa Cileles
		52.	Desa Cilayung
12.	Rancakalong	53.	Desa Nagarawangi
		54.	Desa Pangadegan
		55.	Desa Sukahayu
		56.	Desa Sukamaju
		57.	Desa Pamekaran
		58.	Rancakalong
		59.	Desa Sukasirnarasa
13.	Sumedang Selatan	60.	Kel. Pasanggrahan Baru
		61.	Kel. Regol Wetan
		62.	Desa Citengah
		63.	Desa Ciherang
14.	Sumedang Utara	64.	Kelurahan Kota Kaler
		65.	Kelurahan Talun

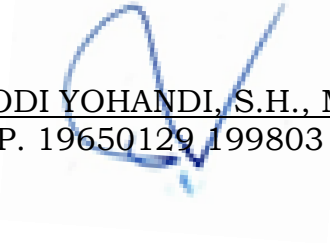
NO	KECAMATAN		DESA/KELURAHAN
		66.	Desa Padasuka
		67.	Desa Jatihurip
		68.	Desa Jatimulya
		69.	Desa Rancamulya
15.	Tanjungkerta	70.	Desa Boros
16.	Ujungjaya	71.	Desa Palasari
		72.	Desa Sakurjaya
		73.	Desa Sukamulya
		74.	Desa Cipelang
		75.	Desa Cibuluh

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001